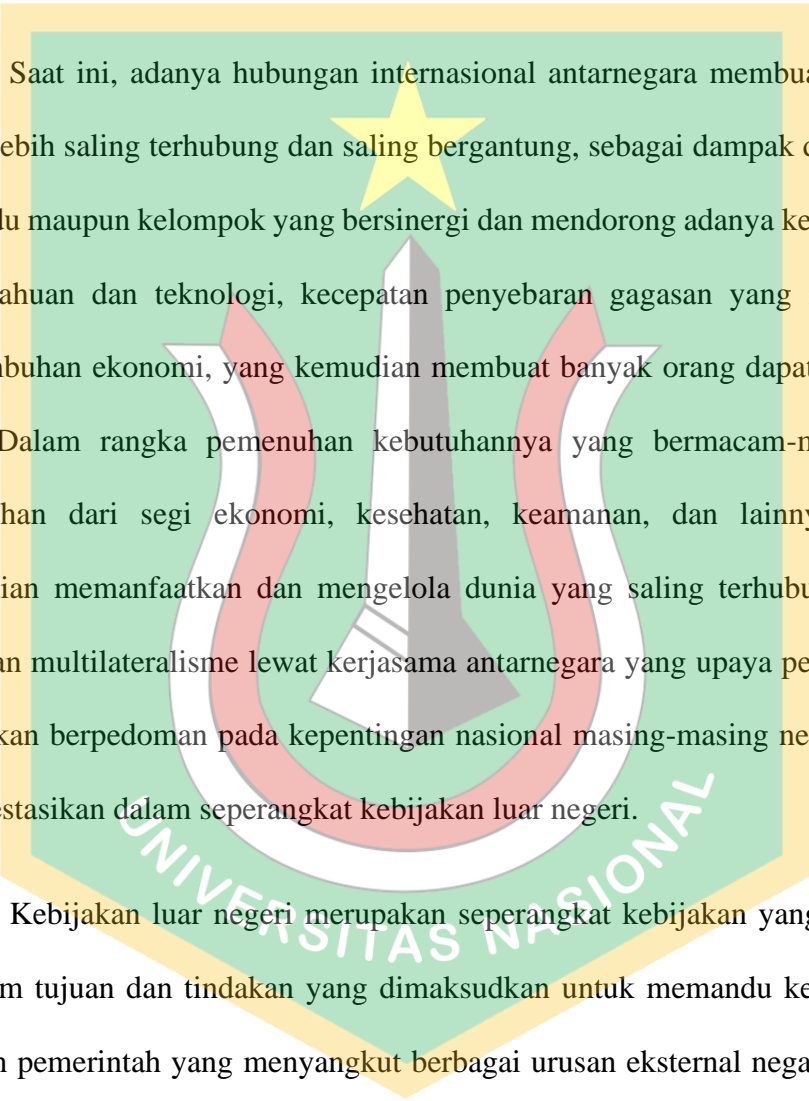


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Saat ini, adanya hubungan internasional antarnegara membuat dunia kita dapat lebih saling terhubung dan saling bergantung, sebagai dampak dari interaksi individu maupun kelompok yang bersinergi dan mendorong adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecepatan penyebaran gagasan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian membuat banyak orang dapat hidup lebih baik. Dalam rangka pemenuhan kebutuhannya yang bermacam-macam, baik kebutuhan dari segi ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lainnya, manusia kemudian memanfaatkan dan mengelola dunia yang saling terhubung dibawah naungan multilateralisme lewat kerjasama antarnegara yang upaya pencapaiannya dilakukan berpedoman pada kepentingan nasional masing-masing negara yang di manifestasikan dalam seperangkat kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang terdiri dari beragam tujuan dan tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah yang menyangkut berbagai urusan eksternal negara, termasuk hubungan dengan negara-negara asing dalam beragam bentuk, misalnya seperti kerjasama, pengiriman bantuan, pendanaan, dan masih banyak lagi, dengan menghendaki adanya pertimbangan secara hati-hati mengenai rencana tindakan yang diambil untuk kepentingan dan urusan luar negeri.

Tak terkecuali *The Commonwealth of Australia*, atau yang hari ini secara singkat kita kenali sebagai Australia, yang merupakan negara berdaulat di wilayah Oceania (Pasifik) yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pembuatan kebijakan luar negerinya, yang ditandai dengan 3 hal vital yakni faktor historis, geografis, dan geopolitik kontemporer, termasuk siapa pemimpin Australia yang menjabat pada saat itu, agar tetap sejalan dengan cita-cita negara itu sendiri yakni menjadi aktor politik internasional yang menjadi bagian dari multilateralisme, yang percaya dengan regionalisme dan world order (*international law & order*). Dengan GDP senilai \$1.543 milyar, saat ini Australia menduduki peringkat ke-13 dunia sebagai negara dengan ekonomi terbesar.

Di pasifik, Australia berbagi hubungan sejarah dan budaya dengan banyak negara Kepulauan Pasifik, sehingga Australia memiliki beragam warisan dan kedekatan budaya dengan kawasan tersebut. Pada realitanya, Australia merupakan salah satu donor bantuan terbesar ke Kepulauan Pasifik, yang membantu memberikan baik dukungan materil maupun dukungan teknis untuk membantu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara-negara tersebut, seperti masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Walau Negara-negara Kepulauan Pasifik, kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, yang memberikan peluang ekonomi yang tak terbatas bagi siapapun yang mampu memahami, mengelola, dan memanfaatkannya, khususnya di sektor-sektor seperti sumber daya, perikanan, pariwisata, dan pertanian, data dari World Bank (2014) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 20% orang di sebagian

besar Negara Kepulauan Pasifik masih hidup kesulitan dalam kemelut kemiskinan. Sebba mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, yang diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesulitan akses untuk mobilitas, akses ke pendidikan, juga status pekerjaan dan usia.¹ Di sisi lain, orang-orang di Pasifik juga rentan terhadap guncangan ekonomi dan bencana alam karena keunikan geografi dan keterbukaan ekonomi negara tersebut.

Ketergantungan negara-negara tersebut pada pasar komoditas global untuk sebagian besar kebutuhan dasar dan pendapatan membuat rumah tangga rentan terhadap perubahan harga yang besar untuk barang-barang seperti makanan dan bahan bakar juga memperparah keadaan, dimana bagi Kiribati, Tonga, dan Papua Nugini misalnya, guncangan pada harga makanan dan bahan bakar impor, ekspor komoditas pertanian, dan pengiriman uang, mendorong banyak orang masuk ke dalam jurang kesulitan, sehingga memperdalam keparahan kesulitan yang mereka rasakan.

Instabilitas di negara-negara kawasan Pasifik juga disebabkan oleh keadaan politik dan konflik yang membuat wilayah ini jauh dari kata kondusif, yang salah satunya disebabkan oleh konflik paling serius di kawasan Pasifik Selatan yakni konflik sipil yang terjadi di Kepulauan Solomon dari tahun 1998 hingga 2003. Ketegangan ini merupakan dampak dari ledakan campuran pedesaan-migrasi

¹ World Bank (2014), "Hardship and Vulnerability in the Pacific Island Countries". Diakses dalam <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/27/hardship-and-vulnerability-in-the-pacific-island-countries> (7 Maret 2023)

perkotaan dari Malaita ke Guadalcanal², sehingga menyebabkan perselisihan atas kepemilikan tanah di daerah pinggiran kota ibukota Honiara, dan populasi pemuda pengangguran perkotaan yang siap untuk mobilisasi ke dalam milisi yang lebih bersaing. Di sisi lain, laki-laki muda lainnya direkrut sebagai prajurit oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan dalam perebutan tanah dan identitas. Walaupun awalnya hal ini merupakan fenomena perkotaan, namun ditambah dengan bencana, maka implikasinya menjadi lebih luas saat menyebar ke bagian wilayah lain, sehingga hal ini menunjukkan kerentanan wilayah tersebut terhadap letusan konflik.³

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi politik di negara-negara kawasan Pasifik, juga menyumbang kekhawatiran akan instabilitas, seperti misalnya masa pemilu di Papua Nugini yang terus di dominasi oleh politik uang. Lainnya, para perempuan di negara-negara kawasan Pasifik juga merasakan rasa ketidakamanan pribadi karena rasa takut terhadap pria. Dalam hal ini, sebagai negara yang berbagi sejarah dan banyak hal dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik, Australia, dengan program bantuannya yang beragam, selalu berada di garda terdepan untuk memandu dan membantu negara-negara di kawasan Pasifik untuk membangun ketahanan dan kapasitas di negara-negara Kepulauan Pasifik.

Lebih lanjut, Australia dengan perannya berusaha untuk memaksimalkan kapabilitas yang ada, dengan posisinya sebagai anggota dari PIF (*Pacific Island*

² Hakiki, F., & Sari, D. S. (2020). Keterlibatan RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) dalam Penanggulangan Konflik. 2(2), 208–222.
<https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.27263>

³ Firth, S. (2018), “Instability in the Pacific Islands: A status report”. Diakses dalam <https://www.lowyinstitute.org/publications/instability-pacific-islands-status-report> (7 Maret 2023)

Forum), yakni forum komunikasi regional yang utama di Pasifik. Sejak didirikan pada tahun 1971, PIF (sebelumnya Forum Pasifik Selatan) telah menjadi kunci regionalism kawasan Pasifik Selatan, dan menjadi jalan utama bagi negara-negara pulau kecil Oseania seperti Australia, Cook Islands, Fiji, Federasi Mikronesia, Nauru, New Caledonia (Kaledonia Baru), Niue, Kiribati, Marshall Islands, Palau, Papua Nugini (PNG), Selandia Baru, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu untuk menegaskan suara mereka lewat forum kolektif mengenai isu-isu internasional utama, sehingga memperkuat suara dan pengaruh mereka⁴ dalam isu yang menjadi fokus mereka. Meskipun keberadaan PIF sangat terkait dengan diskursus politik, namun dalam perjalanannya, PIF juga selanjutnya menjadi wadah komunikasi kawasan yang terbuka dengan isu-isu seperti mobilisasi dan telekomunikasi, pendidikan, zona maritim, isu keamanan, dan bahkan isu perubahan iklim⁵ yang disuarakan guna mencapai konsensus lewat agenda pertemuan tahunannya yakni *Pacific Island Forum Leaders Meeting*.

Tak hanya kekuatan Australia dan keberadaan PIF, kehadiran China sebagai kekuatan baru yang menawarkan pendekatan yang kompleks, juga mewarnai regionalisme kawasan Pasifik Selatan. Posisi China sebagai investor terbesar di Australia, sekaligus menjadi salah satu donor utama di Pasifik, bersama dan berdiri sejajar dengan mitra tradisional seperti Australia dan Amerika Serikat di kawasan.⁶

⁴ Shibuya, E. *"The Problems and Potential of the Pacific Island Forum"*. Taylor & Francis, hal. 102

⁵ Ibid, Hal. 106

⁶ Zhang, D (2022). *"China's influence as a Pacific donor"*. Diakses dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/china-s-influence-pacific-donor>

Hubungan antara China dan Australia sendiri telah terjalin sejak 1909, sementara hubungan diplomatik resminya terjalin pada 1941. Dalam hubungan internasional kontemporer, hubungan China dan Australia telah berkembang pesat, manakala kedua negara terlibat aktif di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya dan politik yang mencakup banyak organisasi, baik regional hingga internasional, seperti APEC, KTT Asia Timur dan G20.

Kebangkitan China selama dua dekade terakhir telah mengubah citra negara itu baik di mata dunia maupun lanskap politik global. Dimulai dengan bergabungnya China ke Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO/World Trade Organization*) pada Desember 2001, Cina dengan cepat mengubah ekonominya dari "pabrik dunia" berbiaya rendah menjadi pemimpin global dalam teknologi canggih. Sepanjang perjalanannya, China telah berhasil tak hanya merubah rantai pasokan global, tetapi juga diplomasi internasional, memanfaatkan keberhasilannya untuk menjadi mitra perdagangan dan pembangunan utama bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin, termasuk juga di antaranya dengan Australia sendiri.

Presiden Xi Jinping, pemimpin China saat ini, ingin China menjadi pemimpin di panggung global. Mimpinya adalah membuat dunia aman bagi negara-negara otoriter untuk menjalankan agenda dan aturan mereka tanpa takut akan "tatanan" berdasarkan aturan liberal yang selama ini berlaku. Xi memandang bahwa dunia membutuhkan panduan China untuk memastikan kemakmuran dan perdamaian dunia, dan dia merangkul peran kepemimpinan yang tegas dalam urusan global untuk mendukung hal ini.

China memproyeksikan visinya melalui kebijakan luar negerinya, yang memprioritaskan pentingnya integritas teritorial China dan keamanan negara, tetapi menghadirkan unsur “kebersamaan” dengan sekutunya.⁷ Xi yang merupakan seorang reformis, percaya pada kesetaraan kedaulatan atau gagasan bahwa negara-negara Barat harus menghormati perilaku negara. Untuk mewujudkan visi ini, sebenarnya China telah lama mendorong *soft power*-nya, misalnya lewat kekuatan ekonomi ataupun budaya untuk mencapai agenda penting mereka, namun Xi terutama menggunakan ekonomi, memudahkan akses pasar untuk perusahaan multinasional dan membangun mega proyek infrastruktur misalnya seperti *Belt and Road Initiative* dan Bank Investasi Infrastruktur Asia. Pendekatan tersebut kemudian menunjukkan keberhasilan tatkala PDB China meningkat sebesar 3.983% antara tahun 1990 dan 2020, meningkat dari \$360 miliar menjadi \$14,7 triliun, sementara pangsa produksi globalnya meningkat dari 1,6% pada tahun 1990 menjadi 17,4% pada tahun 2020.⁸ Dan bahkan catatan terakhir di tahun 2022, GDP China mencapai US\$ 18,321 milyar.

Secara hakikat, Australia dan China merupakan mitra dagang yang akrab bagi masing-masing pihak, bahkan China sendiri merupakan mitra dagang terbesar bagi Australia, dimana pada tahun 2018-2019, China mencatatkan diri sebagai pasar ekspor sekaligus sumber impor Australia yang nilai perdagangannya melonjak melewati angka \$230 miliar, nilai yang fantastis yang juga

⁷ Tsang, S. and Olivia Cheung (2022), “Has Xi Jinping Made China’s Political System More Resilient and Enduring?” *Third World Quarterly* 43, no. 1: pp. 225–43, doi:10.1080/01436597.2021.2000857.

⁸ Inat, K and Melih Yildiz (2021) “Will the Rise of China Transform the International System?” *Insight Turkey* 23, no. 4: pp. 231–58, doi:10.25253/99.2021234.13.

membuktikan betapa pentingnya peran kedua negara ini bagi masing-masing pihaknya dalam perdagangan internasional.

Walau begitu, Pada saat yang sama, kekhawatiran tentang globalisasi dan beragam kemajuan yang ada semakin meningkat, yang juga sekaligus meningkatkan resiko dan ketidakstabilan dalam sistem internasional. Sama halnya dengan relasi antar negara, yang tidak selamanya sejalan atau konstan pada frekuensi yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh dinamisnya hubungan Australia dan China. Kedekatan sebagai mitra diplomatik maupun mitra dagang yang telah terbangun sejak bertahun-tahun lamanya, nyatanya tak serta merta menjamin keharmonisan hubungan persahabatan Australia dan China, karena pada realitanya, situasi intim tersebut memburuk secara perlahan ketika hubungan kedua negara merenggang sejak 2018.

Meningkatnya kekhawatiran akan kejayaan China, utamanya dalam bidang ekonomi, yang berdampak pada kemajuan di bidang ekonomi dan penguatan di bidang pertahanan serta keamanan, termasuk adanya program modernisasi militer Beijing⁹ dan luasnya jangkauan pengaruh tersebut, yang membawa implikasi geopolitik yang juga menyebar hingga ke Oceania, tempat dimana Australia menjadi hegemon regional, dan manuver politik China yang juga meluas ke berbagai sektor masyarakat Australia termasuk pemerintahan, universitas, dan media, serta sikap China terhadap sengketa Laut China Selatan, kemudian

⁹ Glaser, C.L (2011), "Why Unipolarity Doesn't Matter (Much)," Cambridge Review of International Affairs 24, no. 2: pp. 135–47, doi:10.1080/09557571.2011.570740.

mengarahkan fokus kebijakan Australia kembali ke Pasifik dalam rangka menahan intensitas pengaruh China di region tersebut.

Terlebih, di wilayah Pasifik, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan di kawasan ini sepanjang sejarah Australia pasca-Perang Dunia II. Dan seiring dengan berjalannya waktu, perhatian China ke Pasifik Selatan semakin intensif, yang ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi China kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya (Dugis, 2018).

Hari ini, China menantang posisi tersebut, dan di saat yang sama berarti Australia harus kompetitif dan gesit untuk memanfaatkan peluang yang akan datang dari ekonomi Asia yang dinamis dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta menjaga stabilitas kawasan Pasifik, yang saat ini diminati oleh kekuatan global. Mengingat sampai saat ini, negara-negara Pasifik juga merupakan negara samudra besar dan semua organisasi regional telah melakukan banyak hal di kawasan itu, namun tidak ada hal yang cukup signifikan yang dilakukan untuk memberikan dampak (Beck, 2020).

Dalam lingkungan yang dinamis ini, Australia harus mencari peluang sambil melindungi kepentingannya dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian tatanan dunia. Ditengah dunia yang kompetitif, di mana Australia berdiri di antara kepentingan strategis sekutu abadnya Amerika Serikat dan mitra dagangnya China, kebijakan domestik dan internasional harus bekerja sama, berjalan selaras, untuk memaksimalkan kekuatan nasional dan pengaruh internasionalnya.

Terlebih, tatanan kawasan berbasis aturan yang stabil sangat penting untuk memastikan akses Australia ke sistem perdagangan yang terbuka, bebas, dan aman serta meminimalkan risiko ketidakstabilan yang secara langsung akan memengaruhi kepentingan Australia. Tatanan global berbasis aturan yang stabil berfungsi untuk meminimalisir ancaman sebelum menjadi ancaman eksistensial bagi Australia, dan memungkinkan akses tak terbatas ke rute perdagangan, komunikasi dan transportasi yang aman untuk mendukung pembangunan ekonomi Australia (Ayson, 2016).

Kebijakan luar negeri yang aktif, tegas, dan inovatif yang dibangun di atas fondasi domestik yang kuat, dengan keberadaan ekonomi yang fleksibel, kemampuan pertahanan dan keamanan nasional yang kuat, serta institusi demokrasi yang tangguh dalam masyarakat yang kohesif sangatlah diperlukan. Maka dari itu, kemampuan diplomatik, pertahanan, dan keamanan nasional yang kuat akan sangat penting untuk membawa keuntungan pada Australia sendiri.

Nilai-nilai Australia merupakan komponen penting dari landasan di mana Australia membangun keterlibatan internasionalnya, misalnya dukungan untuk kebebasan politik, ekonomi dan agama, demokrasi liberal, supremasi hukum, kesetaraan ras dan gender dan saling menghormati, untuk mendukung masyarakat yang kuat, adil dan kohesif di dalam negeri, mencerminkan siapa Australia dan bagaimana Australia mendekati dunia. Hal ini juga kemudian menjadi keunggulan tersendiri sekaligus menjadi sumber pengaruh bagi Australia secara internasional.

Seiring dengan perubahan distribusi kekuasaan di Pasifik, kepentingan Australia menjadi lebih jelas; bahwa Australia ingin memusatkan fokus untuk menjaga perdamaian guna membantu mempertahankan pertumbuhan yang akan membawa kawasan ini menjadi pusat ekonomi global, tempat dimana Australia dapat mengimplementasikan tindakan sesuai dengan kepentingannya secara bebas, dan tidak dibatasi oleh pelaksanaan kekuasaan koersif, ditengah pertumbuhan kekuatan China, yang memunculkan tantangan tersendiri bagi lingkungan di mana kepatuhan terhadap aturan memberikan perdamaian abadi, di mana hak-hak semua negara dihormati, dan di mana pasar terbuka memfasilitasi arus bebas perdagangan, modal, dan gagasan-gagasan yang akan membawa pihak-pihak yang ada di dalam kawasan pada kemakmuran.

Untuk mencapainya, Australia meluncurkan program *Pacific Step-up*, yang menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri tertinggi Australia, yang diumumkan untuk pertama kalinya pada bulan September tahun 2016 oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull di Forum Kepulauan Pasifik ke-47, di Mikronesia, sebagai 'langkah perubahan' pendekatannya ke kawasan ini, dimana hal ini juga disorot dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia (*Australia Foreign Policy White Papers*) Tahun 2017 sebagai hal yang sangat penting bagi Australia untuk memaksimalkan penerahan kekuatannya.

Selanjutnya, pada 8 November 2018, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan Australia akan membawa level Australia ke dalam keterlibatan ke tingkat yang lebih tinggi, yang menandakan babak baru dalam hubungan “keluargaan” dengan Pasifik. Dengan mengusung gagasan “*Stepping Up Our*

Engagement in the Pacific”, *The Pacific Step-up* menitikberatkan fokus pada keterlibatan yang berkelanjutan dengan kawasan Pasifik yang menjadi prioritas dengan lebih meningkatkan komitmen di kawasan, sebab, masa depan Australia salah satunya akan sangat terkait dengan keadaan di Pasifik, yang juga berhubungan dengan kepentingan pada koridor kedaulatan, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran Pasifik, terutama terkait dengan posisi China sebagai entitas kuat di Pasifik, khususnya Pasifik Selatan, dengan beragam donor bantuannya yang sangat berpengaruh, dimana keterlibatan China yang semakin mendalam dalam hubungannya dengan negara-negara di Pasifik Selatan, secara tidak langsung menjadi hal utama yang diperhatikan Australia, guna mempertahankan posisinya sebagai mitra regional utama negara-negara Pasifik Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Australia Pada Masa Perdana Menteri Scott Morrison Merespon Pengaruh China di Kawasan Pasifik Tahun 2018-2022”. Hal ini akan melihat bagaimana aktor negara dengan kredibilitas dan kemampuannya menyikapi dan menangani isu yang menciptakan tantangan bagi nasionalisme Australia, stabilitas regional, dan juga geopolitik internasional.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, sejak awal kepemimpinannya di tahun 2018, telah menegaskan akan mengawal manuver kebijakan luar negeri Australia untuk di fokuskan ke kawasan Pasifik, terutama Pasifik Selatan, yang menjadi area kompetisi oleh *major powers* seperti Amerika Serikat dan China, yang masing-masing juga merupakan sekutu dan mitra dagang Australia. Komitmennya

pertama kali disampaikan oleh Scott Morrison dalam pidatonya kepada pasukan di Lavarack Barracks, Queensland, pada November tahun 2018, segera setelah ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Australia, dimana pada sesinya, ia mengatakan “dia merangkul babak baru dalam hubungan dengan keluarga Pasifik kami”.

The Pacific Step-Up akan mengarahkan fokus Australia pada negara-negara “keluarga” Pasifik-nya, untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan Australia terkait peningkatan kapasitas dan ketahanan di seluruh Pasifik, termasuk melalui pengembangan infrastruktur yang signifikan dan kegiatan pelatihan bersama, yang dibangun di atas ikatan sejarah yang mendalam, guna mengkoordinasikan keterlibatan Australia dengan lebih baik di kawasan ini untuk tujuan strategis yang berkelanjutan.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Australia Pada Masa Perdana Menteri Australia Scott Morrison merespon pengaruh China di kawasan Pasifik tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Australia Perdana Menteri Australia Scott Morrison merespon pengaruh China di kawasan Pasifik tahun 2018-2022

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang peran Australia dalam isu stabilitas regional Pasifik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kondisi geopolitik kontemporer di Pasifik

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan dalam kajian studi hubungan internasional di kawasan Australia dan Pasifik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menafsirkan implementasi konsep kebijakan luar negeri Australia di kawasan Pasifik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan hasil penelitian akan disusun yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait penelitian yang akan dijalankan, serta berisi tentang kerangka teori yang relevan terkait dengan tema skripsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan konsep, variable penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta validitas dan kredibilitas data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang di klasifikasikan sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan atau fokus masalah yang dikaji.

BAB V: ANALISA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di kembangkan dan di analisa lebih dalam sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan atau fokus masalah yang dikaji.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian kesimpulan menyajikan seluruh penemuan penelitian yang mengandung relevansi dengan masalah penelitian secara ringkas. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi terhadap data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisikan uraian langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada hal-hal yakni sebagai berikut:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlu diadakannya penelitian lanjutan.

2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang yang masih relevan dengan fokus penelitian.

